

### **BAB III**

#### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum NU Wilayah Lampung**

##### **1. Sejarah Berdirinya NU Wilayah Lampung**

Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Lampung adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang terdapat dalam lingkup wilayah Provinsi Lampung yang berhaluan *Ahlussunah Wal Jama'ah* (Aswaja), dan merupakan bagian dari organisasi keagamaan (*Jami'yah Diniyyah Islamiyyah*) Nahdlatul Ulama tingkat Nasional. Sebagaimana induknya, organisasi ini ditujukan sebagai wadah mempersatukan diri dan langkah dalam melaksanakan tugas memelihara, melestraikan, mengemban dan mengamalkan ajaran Islam *'ala ahadil madzhabil arba'ah* dalam rangka mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil'alamiin*.<sup>1</sup>

Pada tahun 1964 Lampung menjadi provinsi memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan, PBNU membentuk mandataris menyusun Pengurus NU Wilayah Lampung yang diketuai oleh KH. Muhammad Zakri.

Pada saat berdirinya, NU Wilayah Lampung pada tahun 1964 terdiri dari tujuh cabang yaitu ; Cabang Teluk Betung, Kota Bumi, Menggala,

---

<sup>1</sup>Sekretariat NU Wilayah Lampung, *Panduan Musyawarah Kerja Wilayah*. (Masa Khidmah 2012-2017)

Krui, Sukarame, Kota Agung, dan Talang Padang. Kepengurusan NU Wilayah Lampung sejak tahun 1964 adalah sebagai berikut;<sup>2</sup>

- a. Priode 1964 – 1968 diketuai oleh H. Marhusen.
- b. Priode 1968 – 1979 diketuai oleh KH. Zahri.
- c. Priode 1979 – 1983 diketuai oleh H. Volta Jeli Panglima.
- d. Priode 1983 – 1992 diketuai oleh Drs. Ramos Jaya Saputra.
- e. Priode 1992 – 1997 diketuai oleh H. Khusnan Mustofa Gufron.
- f. Priode 1997 – 2002 diketuai oleh H. Khusnan Mustofa Gufron.
- g. Priode 2002 – 2007 diketuai oleh Drs. H. Khairudin Tahmid, M. H.
- h. Priode 2007 – 2012 diketuai oleh KH. Ngaliman Marzuqi.
- i. Priode 2012 – 2017 diketuai oleh KH RM Sholeh Bajuri, SHI.

## 2. Visi dan Misi

Berdasarkan analisis obyektif tentang kondisi NU Provinsi Lampung saat ini, analisis terhadap kajian SWOT termasuk harapan sekian banyak *stakeholders* NU, maka Visi atau kondisi ideal yang diharapkan oleh PWNU Lampung Masa Khidmah 2012-2017 adalah;<sup>3</sup>

*"Terciptanya NU Provinsi Lampung sebagai Organisasi yang Terkonsolidasi, Mantap, dan Mandiri dalam Meningkatkan Pelayanan terhadap Hak-Hak Jama'ah secara Demokratis & Ber-Akhlaqul Karimah"*

---

<sup>2</sup>Yulyana, "Pendapat Ulama NU dan Muhammadiyah di Lampung tentang Hadiah Pahala Kepada Mayat". (Skripsi Program Akhwal Al-Syakhsyah IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2009), h. 57.

<sup>3</sup>Sekretariat NU Wilayah Lampung, *Op. Cit.*.

Adapun Misi PWNU Lampung untuk mewujudkan Visi tersebut di atas adalah;<sup>4</sup>

a. Penataan dan Pengembangan Manajemen Organisasi

Bahwa tugas dan mandat yang harus dilaksanakan oleh PWNU Lampung ke depan akan semakin berat. Hal ini mengingat demikian besarnya harapan yang diberikan oleh PBNU yang menjadikan NU Lampung sebagai pelopor perkembangan NU di luar Jawa. Sementara *Jama'ah* dan termasuk pengurus NU di cabang, Majelis Wakil Cabang dan Ranting mengharapkan peran-peran yang lebih konkret dan komprehensif dari PWNU Lampung agar mampu memimpin sekaligus memback-up kerja-kerja pelayanan umat yang semakin kritis. Oleh karenanya, kebutuhan akan sistem pengelolaan manajemen organisasi NU Lampung yang lebih efektif dan efisien tidak bisa ditunda-tunda lagi. Penataan sistem organisasi dimulai dengan penataan sistem dan kemudian dilanjutkan dengan pengisian personal yang kompeten untuk menjalankan sistem tersebut.

b. Pengembangan Keagamaan

Bahwa perkembangan isu-isu keagamaan di Indonesia akhir-akhir ini membutuhkan sebuah sikap dan langkah yang cukup tegas. Munculnya radikalisme Islam dan gerakan-gerakan teror yang mengatasnamakan jihad merupakan sedikit dari fenomena tersebut. Kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, berusaha hendak

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

menegakkan Khilafah Islamiyah di Indonesia menggantikan Pancasila. Penegakan syariat-syariat Islam di daerah-daerah adalah langkah awal yang dipandang sukses oleh Kelompok-kelompok radikal tersebut. NU sebagai sebuah kekuatan Islam yang lahir dan besar dengan ciri pluralisme jelas harus berdiri di barisan terdepan untuk mengembalikan Islam yang *rahmatan lil alamin* di Indonesia.

c. Pengembangan dan Pelayanan Jama'ah

Bahwa salah satu unsur terpenting yang memberi andil dalam membesarkan NU Lampung adalah *nahdliyin*. Selama ini, dengan berbekal semangat dakwah dan berjuang menyebarkan syiar Islam dan semangat aswaja, *nahdliyin* telah memberikan segalanya untuk kemajuan organisasi. Kesetiaan, pengabdian, dukungan moral dan bahkan dukungan materi yang tidak sedikit jumlahnya. Sudah saatnya, organisasi ini memberikan perhatian terhadap *jama'ah*-nya, yang sebagian besar dari kalangan menengah ke bawah. Usaha meningkatkan kesejahteraan dibidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi adalah sektor yang perlu digarap oleh NU Lampung.

d. Pengembangan Jaringan Kerjasama Kelembagaan

Bahwa pihak luar khususnya para pemegang kebijakan melihat NU merupakan salah satu elemen penting bangsa ini, sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Kekuatan NU yang besar bisa dimanfaatkan tidak saja untuk dukungan politik, tapi juga riil untuk pelaksanaan

program-program pemerintah dan instansi lainnya. Untuk itulah, Pemerintah dan beberapa lembaga Internasional telah menjalin Kerjasama program dengan NU, termasuk di dalamnya NU Lampung. Hingga saat ini, setidaknya ada 15 MoU yang sudah ditandatangani oleh ketua Umum NU dengan Menteri dan pemimpin lembaga lainnya. Bagaimana agar program-program Kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi NU, haruslah dikelola dengan baik pula.

### **3. Struktur dan Tata Kerja NU Wilayah Lampung**

Berikut Susunan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung Masa Khidmat 2012-2017 berdasarkan SK dari PBNU tentang Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 230/A.II.04/04/2013 tanggal 17 April 2013.<sup>5</sup>

#### **a. *Mustasyar***

- 1) KH Ahmad Shodiq
- 2) KH Jamaludin Al Busthomi
- 3) KH Abdul Halim Maftuhin
- 4) KH Arief Makhya
- 5) Drs KH M Tabrani Daud
- 6) Prof Dr KH Moh. Mukri, MA
- 7) Prof Dr Ir Sugeng P Haryanto
- 8) Drs H Musa Zainudin
- 9) KH Ma'ruf Adnan
- 10) KH Syamsudin Thohir

---

<sup>5</sup>Wawancara Ketua Tanfidziyah NU Wilayah Lampung, (Sabtu, 12 Februari 2016 )

- 11) KH Hafiduddin Hanief
- 12) KH Muhsin Abdillah
- 13) Dr KH Khairuddin Tahmid, MH
- 14) H Ihwan Asron, MA
- 15) Habib Usaman Husen Al Habsi
- 16) H Ismail Sanjaya
- 17) H Malhani Manan
- 18) H Mukhtar Lutfi, SH, MH

**b. *Syuriyah***

**1) *Rais Syuriyah***

- a) Drs KH Ngaliman Marzuqi, MPdI

**2) *Wakil Rais Syuriyah***

- a) Drs KH Bahrudin, MA
- b) KH Muhtar Sya'roni Maksum
- c) Dr Abdul Syukur, MA
- d) KH A. Syukron
- e) KH Miftahudin Al Busthomi
- f) KH Imam Muhyiddin
- g) Drs KH Heriyuddin Yusuf
- h) Dr H Yusuf Baihaqi, MA
- i) Dr H Ainul Ghoni, MAg

**3) *Katib Syuriyah***

- a) KH Ihya Ulumuddin

**4) *Wakil Katib Syuriyah***

- a) KH Muhammad Mabror, MSi
- b) KH Basyaruddin Maisir
- c) Habib Ahmad Husen Al Habsi
- d) Kiai Musyafa' Ahmad

- e) Kiai Cecep Badruddin Hasan Basri
- f) KH Syaikhul Ulum Syuhada, SPdI
- g) dr Ahmad Farich

**c. *A'wan***

- 1) Prof Dr M Nasor
- 2) Dr Wan Jamaluddin, MA
- 3) Dr KH Afif Ansori
- 4) Dr Alamsyah
- 5) Dr Asrori
- 6) Drs H Suyoto, MAg
- 7) KH Khoirul Anam
- 8) KH Munadzir
- 9) KH Umar Anshori Khusnan
- 10) KH Haris Al Hamdani
- 11) KH Rois RS
- 12) KH A Wahid Zamas
- 13) KH Munir
- 14) Ir H Nur Zaini
- 15) KH Imam Zuhdi Adnan
- 16) Drs Ahmad Basyir Al Huda
- 17) Kiai Khoiri Abu Bakar, SH
- 18) KH Nur Mahfudz
- 19) Dr Andi Ali Akbar

**d. *Tanfidziyah***

- 1) **Ketua**
  - a) KH RM Sholeh Bajuri, SHI
- 2) **Wakil Ketua**
  - a) H Heri Iswahyudi, MAg

- b) H Okta Rijaya, SHI
- c) Dr Syamsuri Aly
- d) Drs Lazuardi Alwi
- e) Chairullah AY
- f) H Noverisman Subing, SH, MH
- g) Dr H Aom Karomani, MSi
- h) Drs Saeful Islam
- i) Sholihin, SPdI, MH
- j) Ir Teguh Wibowo
- k) Juwendra Asdiansyah

**3) Sekretaris**

- a) Drs Aryanto Munawar

**4) Wakil Sekretaris**

- a) Khaidir Bujung, SAg
- b) Muhiddin Penata Gemilang, SE
- c) Ichwan Aji Wibowo, SPP
- d) Abdullah Mukhtar Aly, Lc, SPdI
- e) Maulana Mukhlis, SIP, MIP
- f) Indrayani, SPd
- g) Mislamudin, SPd

**5) Bendahara**

- a) M. Tio Aliyansyah, MH

**6) Wakil Bendahara**

- a) Arifin Gunawan, SE
- b) Himalson, SE
- c) H Ayong Ismail
- d) Drs M Effendi



## B. Pendapat Ulama NU terhadap Batasan Usia Anak

Anak adalah manusia yang belum mencapai *akil baligh* ( dewasa ), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban. Demikian yang diungkapkan oleh Munawwir, ungkapan yang sama disampaikan pula oleh Yusuf Baihaqi, mereka mengatakan bahwa untuk keadaan saat ini, ada sebagian anak-anak yang telah mencapai masa *baligh* sebelum berusia 15 tahun, terkadang ditemui ada anak laki-laki yang baru berusia 10 tahun telah mengalami *ihtilam* (mimpi basah) atau anak perempuan yang telah mengalami menstruasi pada usia 9 tahun.<sup>6</sup>

Selanjutnya Yusuf Baihaqi mengatakan, bahwa menurut bunyi hadis pada kata *عن الصبي حتى يحتلم* , yang artinya dari anak-anak sampai mereka *ihtilam* menunjukan bahwa semua anak yang telah mengalami *ihtilam* (mimpi basah) mereka sudah disebut sebagai orang *baligh*. Dengan demikian anak tersebut tidak lagi disebut sebagai anak, namun sudah dapat disebut seorang dewasa. Jadi, dalam hukum Islam pengertian anak adalah mereka yang belum mengalami gejala atau tanda-tanda orang dewasa salah satunya *ihtilam* sebagaimana telah disebutkan.

---

<sup>6</sup>Munawwir, wawancara dengan penulis, Kantor PW NU Wilayah Lampung, Bandar Lampung, 11 Juni 2015, dan Yusuf Baihaqi, wawancara dengan penulis, IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 29 Desember 2016.

Kemudian, mengenai usia 15 tahun yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i sebagai usia *baligh*, adalah merupakan batas usia maksimal untuk seorang dapat disebut orang dewasa. Maksudnya, jika sampai usia 15 tahun anak itu belum mengalami *ihtilam* atau menstruasi (bagi perempuan) maka patokan 15 tahun menjadi syarat tersebut.<sup>7</sup>

Sementara Afif Ansori mengatakan bahwa *Baligh* merupakan suatu istilah dalam Hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. *Baligh* dalam bahasa Arab memiliki arti "sampai", maksudnya "telah sampainya umur seseorang pada tahap kedewasaan". Prinsipnya, seorang laki-laki yang telah baligh jika sudah pernah mimpi basah (mengeluarkan sperma). Adapun seorang perempuan disebut *baligh* jika sudah menstruasi.<sup>8</sup>

Menurut beliau jika melihat kenyataan saat ini, tentu cukup sulit untuk memastikan pada usia berapa seorang anak lelaki mengalami mimpi basah atau seorang anak perempuan mengalami menstruasi. Keadaan ini terjadi akibat dari adanya perbedaan kondisi fisik dan psikologis pada setiap anak, kondisi ini terjadi karena adanya dua faktor dominan yang menyebabkan masa *baligh* setiap anak berbeda satu dengan yang lainnya. Faktor yang pertama adalah gizi, karena semakin baik gizinya maka akan semakin cepat pula fisik seorang anak berubah yang akhirnya mereka dapat mengalami proses *baligh* dini. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan, lingkungan sebagai wadah anak mengekspresikan segala yang

---

<sup>7</sup>*Ibid.*,

<sup>8</sup>Afif Ansori, wawancara dengan penulis, IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 28 Desember 2016.

dilihat, didengar dan dirasa, secara alamiah mereka akan mempelajari semua hal tersebut, yang lambat laun telah membangun psikologis mereka terhadap keadaan tersebut. Selain daripada itu, akses dunia informasi dan teknologi pada saat ini sangat cepat dan mudah untuk dilakukan oleh siapapun, tidak menutup kemungkinan anak yang baru berusia 9 atau 10 tahun, yang dari informasi dan teknologi itu mereka mempelajari dan mengekspresikan dalam kehidupannya.<sup>9</sup>

Faktor fisik dan psikologis yang ada pada manusia normal, merupakan suatu proses alami yang dapat menyebabkan anak pada usia muda mengalami proses *baligh*. Dan akan bervariasi terjadinya dalam setiap lingkungan dan keadaan, proses ini merupakan umum yang terjadi pada setiap anak. Oleh karena itu, tidak semua anak harus *baligh* pada usia 15 tahun, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Syafi'i, beliau sebenarnya hanya mengemukakan batas usia maksimal anak dapat dikatakan *baligh*, yaitu setelah secara sempurna mereka berusia 15 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa Kitab Fiqih yang berhaluan Madzhab Safi'i, biasanya di dalamnya akan dijelaskan mengenai syarat seorang bisa dikatakan telah *baligh*, salah satunya dalam kitab Safinatun Najah yang berbunyi seperti ini;<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid.*,

<sup>10</sup>*Ibid.*

(فَصْلٌ) عِلَامَةُ الْبُلُوغِ ثَلَاثٌ، تَمَامُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الذَّكَرِ  
وَالْأُنْثَى، وَالْإِحْتِلَامُ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ، وَالْحَيْضُ فِي  
الْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ

Artinya; Tanda-tanda Baligh yaitu 3 : Sempurna umurnya 15 tahun pada laki-laki dan perempuan , dan mimpi pada laki-laki dan perempuan bagi umur 9 tahun , dan dapat haid pada perempuan bagi umur 9 tahun.<sup>11</sup>

Dalam kesempatan lain, Ihya Ulumuddin mengatakan hal yang sama mengenai variasi masa *baligh* seorang anak, hal ini dikemukakan oleh beliau berdasarkan kenyataan yang terjadi pada putri beliau. Putrinya mengalami haid pertama pada usia 9 tahun, kejadian ini menurutnya adalah akibat dari keadaan lingkungan anak tersebut. Anak yang berada dalam kondisi cerdas serta lingkungan yang sehat, damai dan tenang akan menjadikan seorang anak mencapai masa *baligh* lebih cepat.<sup>12</sup>

Berapapun usia anak tersebut secara hukum Islam mereka telah disebut anak *baligh* dan mereka telah mendapatkan kewajiban dan tugas sebagai seorang *mukallaf*. Oleh karena itu, anak tersebut akan mendapatkan sanksi (hukuman) bila dia meninggalkan kewajibannya (karena berdosa) dan dia akan mendapatkan pahala dari setiap kebaikan yang dilakukannya. Terlepas dari itu, yang paling pokok ialah, bahwa anak tersebut bukan hanya sekedar *baligh* tetapi juga harus tahu keuntungan

<sup>11</sup>diterjemahkan oleh Muhlisin, (guru Fiqih pada Pon-Pes Al-Mubarak Bukitkemuning Lampung Utara.

<sup>12</sup>Ihya Ulumuddin, wawancara dengan penulis, Pondok Pesantren Madarijul Ulum, Bandar Lampung, 30 Desember 2016.

dan kerugian dari perbuatannya tersebut atau dalam bahasa fikih dikenal dengan istilah *tamyiz*.<sup>13</sup>

Keadaan *tamyiz* ini nantilah yang akan menentukan apakah anak ini dapat dipersalahkan atau tidak atas kesalahannya dan pelanggaranannya, jika pada usia *baligh* muda atau di bawah usia 15 tahun mereka telah *tamyiz* maka mereka dapat dipersalahkan atas kesalahan dan pelanggaranannya. Tetapi, jika anak tersebut *baligh* namun belum *tamyiz* maka mereka tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, oleh karena mereka belum bisa memahami dampak akibat perbuatan yang mereka lakukan secara utuh, artinya mereka masih harus dibimbing menuju usia *baligh* secara sempurna, baik itu secara fisik maupun psikologis.<sup>14</sup>

Sementara Syamsuddin Thohir mengatakan, bahwa memberikan batasan umur adalah untuk kepastian hukum, karena ini terkait kecakapan hukum. Karena, kedewasaan seseorang memang menjadi tolak ukur untuk menentukan apakah ia cakap secara hukum atau tidak. Kata dewasa disini maksudnya cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda-tanda lelaki dewasa pada pria, begitu juga muncul tanda-tanda wanita dewasa pada puteri. Yang umum biasanya adalah mengalami *ihtilam* (mimpi basah), haid, mengandung serta tumbuhnya rambut halus didaerah tertentu. Dalam hal ibadah, anak yang telah mengalami keadaan tersebut diatas telah sah (diterima secara hukum), semisal seorang laki-laki yang telah mengalami *ihtilam* dapat diterima menjadi imam sholat walaupun usianya masih di

---

<sup>13</sup>*Ibid.*,

<sup>14</sup>*Ibid.*,

bawah 15 tahun (*murahiq*), selama dia telah memahami tatacara ibadah dengan utuh, baik itu dari cara bersuci maupun pelaksanaan sholat tersebut, walaupun hal itu dimakruhkan.<sup>15</sup>

Hal yang memakruhkan anak tersebut menjadi imam sholat ialah, karena mereka masih dalam keadaan *tamyiz* yang memiliki takaran berbeda dalam setiap kesempatan. Dalam masalah transaksi mereka belum dapat diterima tindakannya, oleh karena itu syarat yang harus terpenuhinya usia 15 tahun anak. Yang dalam fikih batas usia 15 tahun adalah telah *baligh*, namun 15 tahun ini dapat saja berubah akibat situasi. Situasi lingkungan, hormon dan pengetahuan anak pada usia 13 tahun yang memungkinkan anak tersebut mengalami *ihtilam* lebih cepat. Tetapi intinya adalah, mereka semua yang telah mengalami tanda-tanda *baligh* telah berubah status hukumnya, yang awalnya mereka adalah anak-anak yang mutlak bebas dari hukum, kini menjadi seorang dewasa yang memiliki tanggung jawab sendiri terhadap segala perbuatannya, baik itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk.<sup>16</sup>

Pandangan mengenai anak, Sholeh Bajuri, dalam wawancara mengenai batasan usia anak, beliau mengemukakan bahwa, "... dalam hukum Islam batasan seorang anak sampai ia diwajibkan untuk melaksanakan atau menanggung segala perbuatannya adalah sampai usia *baligh*...".<sup>17</sup> yang dimaksud dengan *baligh* adalah, anak yang sudah mencapai usia yang

---

<sup>15</sup>Syamsuddin Thohir, wawancara dengan penulis, Pondok Pesantren Darul A'mal, Metro, 29 Desember 2016.

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>R.M. Sholeh Bajuri, wawancara dengan penulis, Pondok Pesantren Darul Ma'arif, Lampung Selatan, 12 Februari 2016.

mengalihkannya dari masa kanak-kanak (*thufulah*) menuju masa kedewasaan (*rujulah/unutsah*). Masa ini biasanya ditandai dengan nampaknya beberapa tanda-tanda fisik, seperti mimpi basah (*ihtilam*), mengandung dan *haidh*. Dan apabila tanda-tanda tersebut tidak nampak, maka masa baligh ditandai dengan sampainya seorang anak pada umur 15 tahun menurut pendapat madzhab Syafi'i. Hal ini tertuang dalam kitab *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah*, Juz : 8 Hal : 193

الْبُلُوغُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: قُوَّةٌ تَحْدُثُ لِلشَّخْصِ، تَنْقُلُهُ مِنْ حَالِ الطُّفُولَةِ إِلَى حَالِ الرُّجُولَةِ.

وَهُوَ يَحْصُلُ بِظُهُورِ عَلَامَةٍ مِنْ عَلَامَاتِهِ الطَّبِيعِيَّةِ كَالِاحْتِلَامِ، وَكَالْحَبْلِ وَالْحَيْضِ فِي الْأُنْثَى، فَإِنْ لَمْ يَوْجَدْ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْعَلَامَاتِ كَانَ الْبُلُوغُ بِالسِّنِّ. وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَقْدِيرِهِ، فَقَدَرَهُ أَبُو حَنِيفَةَ بِثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً لِلْفَتَى، وَسَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً لِلْفَتَاةِ، وَقَدَرَهُ الصَّاحِبَانِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بِخَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَقْدِيرُهُ بِثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً لِكُلِّ مِنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى

وَفِي هَذِهِ الْمَرَحَلَةِ، وَهِيَ مَرَحَلَةُ الْبُلُوغِ، يَكْتَمِلُ فِيهَا لِلْإِنْسَانِ نُمُوهُ الْبَدَنِيُّ وَالْعَقْلِيُّ، فَتَثْبُتُ لَهُ أَهْلِيَّةُ الْأَدَاءِ الْكَامِلَةِ، فَيَصِيرُ أَهْلًا لِأَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ وَتَحْمِلِ التَّبَعَاتِ، وَيَطَالِبُ بِأَدَاءِ كَافَّةِ الْحُقُوقِ الْمَالِيَةِ، وَغَيْرِ الْمَالِيَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ أَمْ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ. وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا اكْتَمَلَ نُمُوهُ الْعَقْلِيُّ مَعَ اكْتِمَالِ نُمُوهِ الْبَدَنِيِّ، أَمَّا إِذَا وَصَلَ إِلَى سِنِّ الْبُلُوغِ وَلَمْ يَكْتَمِلْ نُمُوهُ الْعَقْلِيُّ، بَانَ بَلُغَ مَعْتَوَاهَا أَوْ سَفِيهَا، فَإِنَّهُ تَجْرِي

عَلَيْهِ أَحْكَامُ الصَّبِيِّ الْمُمِيزِ، وَيَسْتَمِرُّ ثُبُوتُ الْوَلَايَةِ عَلَيْهِ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ  
فِي السَّفِيهِ.<sup>١٨</sup>

Artinya:

Masa *baligh* menurut ulama fiqih ; adalah anak yang sudah mencapai usia yang mengalihkannya dari masa kanak-kanak (*thufulah*) menuju masa kedewasaan (*rujulah/unutsah*).

Masa ini biasanya ditandai dengan nampaknya beberapa tanda-tanda fisik, seperti mimpi basah (*ihtilam*), mengandung dan haidh. Dan apabila tanda-tanda tersebut tidak nampak, maka masa baligh ditandai dengan tahun. Para fuqaha berbeda pendapat, menurut Abu Hanifah bagi laki laki itu umur 18 tahun, dan 17 tahun perempuan. Menurut Imam Syafi'i Dan Ahmad sampainya seorang anak pada umur 15 tahun, dan menurut Imam Malik yaitu pada umur 18 tahun bagi laki laki dan perempuan, ini pendapat yang termasyur.

Pada masa ini, perkembangan tubuh dan akal seorang anak telah mencapai kesempurnaan, sehingga ia diperkenankan melakukan berbagai tashoruf secara menyeluruh (*ahlul 'ada' al-kamilah*). Selain itu seorang anak juga sudah mulai terikat dengan semua ketentuan-ketentuan hukum agama, baik yang berhubungan dengan harta atau tidak, dan baik itu berhubungan dengan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-Nya. Dan semua ini ketika perkembangan tubuh dan akal seorang anak telah mencapai kesempurnaan. Namun, ketentuan ini berlaku apabila seorang anak sudah sempurna akalnya, jika tidak, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum bagi anak kecil yang baru tamyiz (*ahkamus shobiy*), contohnya seperti anak yang kurang waras (*mu'tawih*) dan anak yang idiot (*safih*).<sup>19</sup>

Atau yang menurut Cecep dan Hafidhuddin Hanif dikatakan sebagai *baligh* apabila telah memenuhi kriteria yang diajukan oleh ulama fikih, diantara kriteria tersebut adalah bila anak telah mengalami *ihtilam*, haid, hamil dan tumbuhnya rambut-rambut halus.<sup>20</sup>

<sup>18</sup>*Al-Mausuu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, Al-Maktabah Al-Syamilah, Juz 8, h. 193.

<sup>19</sup>Muhlisin, (guru Fiqih pada Pon-Pes Al-Mubarak Bukitkemuning Lampung Utara. *Op. Cit.*,

<sup>20</sup>Cecep Badruddin Hasan basri, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 20 Oktober 2016., dan Hafidhuddin Hanif, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 1 Januari 2017.



Biasanya *baligh* mulai terjadi pada anak usia 9 tahun sebagaimana dijelaskan dalam kitab Kasyifatun Suja (syarah Safinatun Najah), yang di dalamnya diterangkan bahwa setiap anak yang telah mencapai usia 9 tahun mengalami *ihtilam*, atau haid. Maka, tanda kedua tersebut menjadi tanda permulaan *baligh*, dan mengalami gejala-gejala *baligh* dan bila sampai usia 15 tahun belum mengalami gejala-gejala tersebut maka usia ini menjadi batas akhir. Yaitu sempurna usia 15 tahun ini dipakai sebagai syarat *baligh*.<sup>21</sup>

Tidak berbeda dengan pendapat diatas mengenai batasan usia anak, Khoirudin Tahmid, beliau menyatakan bahwa setiap anak yang telah *ihtilam* atau haid mereka telah dihukumi *baligh*, oleh karena mereka telah diperbolehkan untuk kawin. Bila melihat pada dasar tersebut maka usia 15 tahun yang menjadi batasan umum adalah dengan pertimbangan bahwa, bila sampai usia tersebut anak belum mengalami *ihtilam* atau haid, maka anak tersebut secara hukum telah dewasa.<sup>22</sup>

Dalam kehidupan orang dewasa, secara otomatis mereka telah mendapatkan suatu tanggungjawab atas dirinya sendiri. Karena mereka telah menjadi subjek hukum atau dalam ilmu fiqih dikenal dengan sebutan *mukallaf* yang segala tindakan sudah menjadi tanggungjawabnya, baik itu berupa perbuatan kepada sesama manusia (pergaulan sosial) atau perbuatan terhadap tuhan (ibadah). Dan apabila ada pelanggaran dalam

---

<sup>21</sup>Bapak Cecep, *Ibid.*,

<sup>22</sup>Khoirudin Tahmid., wawancara dengan penulis, IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 15 Agustus 2016.

kehidupannya, dia dapat dikenai atau diberikan sanksi sebagai balasan atas kesalahannya.<sup>23</sup>

### C. Pendapat Ulama NU terhadap Hukuman Penjara Bagi Anak

Memberikan hukuman kepada anak, secara kontekstual perlu dilakukan sebagai upaya untuk mendidik tingkah dan perbuatan anak, dalam pandangan yang diungkapkan oleh Moh. Bahrudin., dalam negara hukum, segala tindakan pelanggaran harus dikenai sanksi hukum, sebagai upaya menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Sebagaimana kita ketahui dalam sila kedua Pancasila disebutkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.<sup>24</sup> Dan dalam al-Qur’an kita temukan ayat yang mengatakan sebagai berikut ;

...وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا...

Artinya: ...Dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa,... (Q.S. Syuraa, 42 : 40)

Setiap perbuatan salah, harus diberikan sanksi atau balasan, yang esensinya ialah untuk menjaga manusia agar tidak berbuat kesalahan. Bila mereka tahu akan akibat dari perbuatannya.<sup>25</sup>

Selain itu, memberi sanksi kepada anak yang melakukan pidana juga sebagai tujuan pencegahan anak digunakan sebagai alat kejahatan. Jika seandainya perbuatan anak tidak dianggap sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka akan ada pemikiran dari masyarakat yang jahat untuk memanfaatkan mereka, bisa saja mereka dimanfaatkan sebagai alat

---

<sup>23</sup>*Ibid.*,

<sup>24</sup>Moh. Bahrudin., wawancara dengan penulis, IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 07 November 2016.

<sup>25</sup>*Ibid.*,

balas dendam, mencuri, membunuh dan kejahatan lainnya. Jika dibiarkan akan ada dampak kejahatan yang akan merusak tatanan dalam kehidupan masyarakat.<sup>26</sup>

Selanjutnya mengenai masalah pemberian hukuman penjara kepada anak, beliau menyampaikan bahwa, pelaksanaan hukuman haruslah diberikan secara khusus, anak memang harus dihukum atas perbuatan salah mereka, tapi bukan hukuman penjara. Memang benar dalam setiap pelanggaran akan ada orang lain (korban) yang dirugikan, tak terkecuali akibat dari perbuatan seorang anak. Semisal ada anak berusia 8 tahun memainkan korek api, kemudian menyebabkan terbakarnya rumah orang lain. Bila tidak diberikan sanksi tentu akan membuat hilangnya rasa adil bagi korban. Adapun cara sanksi yang diberikan kepada anak tersebut adalah dengan ganti rugi, dan orang tua sebagai wali si anak yang bertanggungjawab atas kelalaiannya. Karena anak tersebut belum disebut sebagai orang *baligh* menurut hukum Islam dan dewasa menurut hukum positif.<sup>27</sup>

Mengenai hukuman penjara bagi anak, Yusuf Baihaqi menyatakan bahwa seorang anak yang jika menurut hukum Islam mereka sudah layak disebut dewasa walaupun mereka belum berusia 15 tahun. Maka setiap tindakan pelanggaran harus dikenai sanksi sebagai suatu pengajaran agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian, boleh menghukum asal hukuman yang paling ringan dari sekian banyak pilihan, hematnya hukuman

---

<sup>26</sup>*Ibid.*,

<sup>27</sup>*Ibid.*,

penjara yang diberikan kepada anak itu jangan sampai dilaksanakan, mengingat anak tersebut masih panjang masa depan dan pendidikannya.<sup>28</sup>

Karena pada saat anak tersebut melakukan pelanggaran, mereka melakukan tanpa mengetahui akibat dari perbuatannya, jika mereka membunuh, mencuri dan lain sebagainya mereka hanya bisa dikenai *ta'zir* ringan. Kita lihat penjelasan para ahli fiqih salah satunya dalam kitab *I'anatun al-Tholibiin* sebagai berikut;

فَصْلٌ فِي التَّعْزِيرِ: أَيُّ فِي بَيَانِ مَوْجِبِهِ وَمَا يَحْصُلُ بِهِ، وَالتَّعْزِيرُ لَعْنَةُ التَّأْدِيبِ وَشَرْعًا تَأْدِيبٌ عَلَى ذَنْبٍ لَا حَدَّ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ، كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَةٌ \* (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ) \* الْآيَةُ، فَأَبَاحَ الضَّرْبَ عِنْدَ الْمُخَالَفَةِ، فَكَانَ فِيهِ تَنْبِيهُ عَلَى التَّعْزِيرِ، وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَرَقَةِ التَّمْرِ إِذَا كَانَ دُونَ نَصَابٍ غَرَمَ مِثْلَهُ وَجَلَدَاتٍ نَكَالٍ {رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ}.<sup>29</sup>

Artinya; Pasal dalam *ta'zir* : Maksudnya keterangan yang mewajibkan *ta'zir* dan manfaatnya. *Ta'zir* menurut bahasa adalah memberi pelajaran, menurut syara' yaitu memberi pelajaran atas kesalahan yang didalamnya tidak ada had dan kifar, sebagaimana diambil dalam kalam mushonif, dan asal nya sebelum *ijma'* firman Allah "dan istri istrimu kamu takut kedurhakaannya" maka boleh dipukul sebagai peringatan atas *ta'zir*, nabi Muhammad bersabda, pada pencuri kurma apabila ia tidak sampai nishabnya maka ia harus membayar kurma yang sama, dan di jildah sebagai menakut nakuti.<sup>30</sup>

Jadi, dari penjelasan ini kita ketahui bahwa selama seseorang itu masih disebut sebagai anak maka dia tidak bisa diqisosh. Mereka hanya bisa dita'zir

<sup>28</sup>Yusuf Baihaqi, *Loc.cit.*,

<sup>29</sup>Abu Bakar Usman bin Muhammad Syath Al-Dimyati Al-Syafi'i, *I'anatun Al-Tholibin 'Ala Hal Al-Fadzh Fathul Mu'in* (Hua Hasiyah 'Ala Fathul Mu'in bi Syarah Qurratu al-A'yun Bimuhimmatin Al-Din), Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Alamiyah), h. 188

<sup>30</sup>Muhlisin, (guru Fiqih pada Pon-Pes Al-Mubarak Bukitkemuning Lampung Utara, *Loc.Cit.*,

yang berupa *lil-al-ta'dib* (untuk pendidikan) bukan sebagai balasan. Karena sebenarnya, hukuman *ta'zir* itu merupakan bentuk hukuman yang sangat ringan bahkan bukan merupakan hukuman. Selain itu, berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan bahwa anak-anak itu terbebas dari sanksi atau hukuman sampai mereka masuk pada usia *baligh*.<sup>31</sup>

Adapun yang terjadi seumpama bila anak pada usia 10 tahun telah mengalami *ihtilam* sebagai permulaan masa *baligh*, maka anak yang sudah *baligh* tersebut bisa saja dihukum dengan hukuman penjara. Karena secara hukum Islam anak tersebut bukan lagi anak-anak melainkan sudah *baligh* karena dia telah memenuhi salah satu syarat *baligh*. Walaupun menurut hukum positif anak tersebut masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur, tetapi jika dilihat dalam perundang-undangan Indonesia, anak tersebut sudah dapat dikenakan sanksi tindakan.<sup>32</sup>

Proses pematangan dalam Islam kepada seorang anak adalah ketika mereka telah mencapai usia *baligh*, karena mereka sebenarnya sudah sama tindakan dan tanggungjawabnya dalam kehidupan. Begitu Hafidhuddin Hanif memberikan pandangannya mengenai hukuman kepada seorang anak, menurutnya selama anak tersebut belum memenuhi syarat sebagai seorang dewasa (*baligh*), maka segala tindakannya belum dapat dikenai sanksi bila terjadi pelanggaran. Karena dalam hukum Islam anak tersebut belum mampu untuk memahami dirinya, atau maksud tujuan penciptaan manusia.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Yusuf Baihaqi., *Op.Cit.*,

<sup>32</sup>*Ibid.*,

<sup>33</sup>Hafidhuddin Hanif, *Loc.Cit.*,

Dalam proses memberikan hukuman penjara kepada anak secara psikologis akan berpengaruh buruk, dan juga tidak dibenarkan dalam Islam, karena mereka hanya boleh diberikan *ta'zir* ringan sebagai *ta'dib*, artinya mereka hanya diberi peringatan dan diserahkan kepada walinya untuk dididik secara baik. Karena mereka secara akal belum memahami apa yang mereka lakukan, oleh karena itu mereka perlu dibimbing bukan disakiti.<sup>34</sup>

Karena hukum Islam sangat fleksibel, artinya hukum itu bisa disesuaikan dengan keadaan dan *ilat* (sandaran/sebab) dari hukum tersebut, misalkan ada dua orang anak yang usianya sama 10 tahun namun salah satunya belum mengalami *ihtilam* maka dia tidak dikenakan kewajiban sementara anak yang telah mengalami *ihtilam* telah memiliki kewajiban. Dari sini dapat dilihat dua perbedaan hukum berdasarkan keadaan mereka. Hukum berubah karena sebab *ihtilam*.<sup>35</sup>

Masalah fleksibilitas hukum juga dibenarkan oleh Khoirudin Tahmid, menurutnya, dalam proses pemberian hukuman penjara kepada anak bisa saja dilakukan jika mereka telah berada pada usia *baligh* walaupun menurut hukum positif mereka masih dibawah umur, katakanlah mereka masih dalam usia 10 atau 11 tahun, mereka bisa saja dipidana penjara apabila mereka telah berulang kali melakukan kejahatan atau pelanggaran (*residivis*), sengaja walaupun telah diberikan peringatan dan kejahatan ganda.<sup>36</sup>

Akan berbeda bila pelaku hanya baru satu kali melakukan perbuatan melanggar tersebut. Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di

---

<sup>34</sup>*Ibid.*,

<sup>35</sup>*Ibid.*,

<sup>36</sup>Khoirudin Tahmid., *loc.cit.*,

Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara material maupun nyawa. Namun, di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah, karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap dalam bertindak hukum serta mereka memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan tidak boleh dirampas atau dihilangkan secara paksa.<sup>37</sup>

Hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh pemerintah bilamana memang anak harus diberikan hukuman penjara, menurut Ihya Ulumuddin adalah hak anak untuk mendapatkan kasih sayang orang tua, hak anak untuk bermain dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Jika memang terpaksa harus diberikan hukuman penjara, maka pemerintah harus memberikan kelonggaran kepada anak-anak untuk dapat memenuhi hak-haknya tersebut. Salah satunya adalah dengan menyiapkan lembaga khusus untuk anak, seperti lembaga bimbingan anak yang bermasalah dengan hukum.<sup>38</sup>

Menurut beliau, yang paling pokok adalah usaha bagaimana orang tua sebagai penanggungjawab anak untuk mengajarkan kepada anaknya mengenai perkara baik dan buruk perkara boleh dan dilarang serta perkara-perkara yang akan merugikan anak tersebut. Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang harus berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh

---

<sup>37</sup>*Ibid.*,

<sup>38</sup>Ihya Ulumuddin., *Loc.Cit.*,

orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman, anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa.<sup>39</sup>

Menurut Cecep, sebelum kita memberikan hukuman, seyogyanya kita harus melihat ke belakang. Maksudnya, kita harus melihat sebab kenapa anak melakukan kejahatan. Boleh jadi karena kurang kontrol dan pengawasan anak tersebut menjadi nakal atau liar. Bila kenakalan tersebut betul karena orang tua yang kurang mengawasi anak serta tidak memperdulikan pendidikan anak, maka sebenarnya yang bersalah dan patut disalahkan adalah orang tua anak tersebut. Karena bimbingan orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, baik akal maupun psikologisnya. Setelah itu baru kita dapat menerapkan hukum itu secara proporsional.<sup>40</sup>

Beliau menambahkan bahwa, anak secara mutlak bebas dari tuntutan dan sanksi, semua perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan sampai usia mereka mencapai *baligh*,<sup>41</sup> dalam hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud berbunyi:

---

<sup>39</sup>*Ibid.*,

<sup>40</sup>Cecep., *Loc.Cit.*,

<sup>41</sup>*Ibid.*,



عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَرَأَى وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.<sup>٤٢</sup> ﴿مرواه أبو داود﴾

Artinya: Dari Aisyah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW. telah bersabda : dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia dewasa.<sup>43</sup> (H.R. Abu Daud).

Selanjutnya, dalam proses penerapan hukuman kepada anak yang berada dibawah usia *baligh* diberikan sebagai pengajaran. Seperti diungkapkan dalam hadis Nabi SAW,. Mengenai perintah mengajarkan sholat kepada anak yang masuk usia 7 tahun dan memberikan hukuman apabila pada usia 10 tahun tidak melaksanakan sholat, hukuman ini diberikan sebagai sebuah *ta'zir*.<sup>44</sup>

Maksud dari *ta'zir* di atas, Syamsuddin Thohir menjelaskan yang dimaksud dengan memukul ialah betuk umum, artinya bila dengan peringatan lisan anak tersebut sudah berubah dan meninggalkan kesalahannya, maka cukuplah itu menjadi *ta'zir*nya anak yang berbuat salah tersebut. Selain dengan peringatan lisan, adapula dengan lirikan mata, sikap diam, jeweran, atau pukulan yang nyata yang tidak menyakitkan. Jadi menurut beliau hukuman penjara memang bentuk dari sebuah *ta'zir*, akan tetapi tidak diperuntukkan bagi pelaku pelanggaran oleh anak. Namun, jika melihat pada hukum Islam batasan usia dewasa anak adalah relatif, yang bisa saja anak

<sup>42</sup>Al-Imam Al-Hafidz Al-Mushannif Al-Muttaqin Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'ab Al-Sajastani Al-Azadi, *Sunan Abu Daud*, Juz IV, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt), h. 139.

<sup>43</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 43.

<sup>44</sup>Cecep, *Op.Cit.*,

tersebut sudah *baligh* sebelum masuk usia 15 tahun, sebagaimana batasan umum yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i.<sup>45</sup>

Maka, anak yang sudah *baligh* tersebut boleh-boleh saja di hukum, adapun hukuman penjara disesuaikan dengan jenis kejahatan dan perbuatannya, apakah kejahatan itu berat dan dilakukan berulang-ulang. Jadi, walaupun menurut Undang-undang mereka belum dewasa tetapi secara hukum Islam mereka telah dewasa, maka tidak ada masalah jika harus memenjarakan anak yang melakukan kejahatan tersebut.<sup>46</sup>

Kembali kepada keadaan *baligh* setiap anak yang berbeda masanya, Afif Ansori mengatakan bahwa kasus pemberian hukuman penjara bagi anak yang menurut Undang-undang masih di bawah umur, dan sudah dewasa menurut hukum Islam adalah boleh, yang dalam praktik diserahkan kepada hakim yang berwenang dalam pertimbangan apakah anak tersebut dapat dihukum dengan hukuman penjara atau hukuman lainnya. Tetapi jelas mereka harus dibedakan dengan narapidana dewasa, dengan tujuan anak tersebut berubah dan jera.<sup>47</sup>

Karena, anak yang telah melakukan tindakan pidana harus segera diperbaiki melalui tindakan yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan dan masa depan yang baik untuk anak. Tindakan yang diberikan kepada anak adalah tindakan yang bersifat mendidik, guna memulihkan kembali kondisi

---

<sup>45</sup>Syamsuddin Thohir., *Loc.Cit.*,

<sup>46</sup>*Ibid.*,

<sup>47</sup>Afif Ansori., *Loc.Cit.*,

anak tersebut menjadi anak yang baik, bukan dengan hukuman pembalasan terhadap mereka setelah menjalani peradilan.<sup>48</sup>

Sejalan dengan pendapat di atas, ketua Lembaga Bahtsul Masai'l mengemukakan "... seorang anak bisa dan boleh diberi hukuman penjara sebagai suatu pengajaran, atau dalam bahasa fiqih boleh diberi *ta'zir* asal bukan *qishsash* dari setiap kejahatan yang mereka lakukan".<sup>49</sup> Hal ini diungkapkan dengan dasar berikut;

(وَشَرَائِطُ وَجُوبِ الْقَصَاصِ فِي الْقَتْلِ (أَرْبَعَةٌ). وَفِي بَعْضِ النَّسَخِ «فَصْلٌ وَشَرَائِطُ وَجُوبِ الْقَصَاصِ أَرْبَعٌ»: الْأَوَّلُ (أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ بَالِغًا)؛ فَلَا قَصَاصَ عَلَى صَبِيٍّ. وَلَوْ قَالَ: «أَنَا الْآنَ صَبِيٌّ»، صَدَقَ بِلَا يَمِينٍ. الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ (عَاقِلًا)؛ فَيَمْتَنِعُ الْقَصَاصُ مِنْ مَجْنُونٍ إِلَّا أَنْ تَقْطَعَ جُنُونُهُ، فَيَقْتَصَّ مِنْهُ زَمَنُ إِفَاقَتِهِ. وَيَجِبُ الْقَصَاصُ عَلَى مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِشَرْبِ مُسْكِرٍ مُتَعَدٍّ فِي شَرْبِهِ؛ فَخَرَجَ مَنْ لَمْ يَتَعَدَّ، بِأَنْ شَرِبَ شَيْئًا ظَنَّهُ غَيْرَ مُسْكِرٍ فَزَالَ عَقْلُهُ، فَلَا قَصَاصَ عَلَيْهِ.<sup>50</sup>

Artinya; Syarat syarat wajib qisosh (dalam hal pembunuhan) itu ada 4, (dalam sebagian tulisan lafadz arba'atun ditulis arba'un ). Pertama, orang yang membunuh itu baligh, (maka anak kecil tidak di qisosh, walaupun ia mengatakan saya sekarang masih kecil perkataan itu dibenarkan). Kedua, orang yang membunuh itu berakal, (maka qisosh orang gila dilarang, kecuali dia sudah waras, maka di qisosh pada masa sembuhnya, dan wajib qisosh bagi orang yang hilang akalnya sebab dia sudah biasa minum minuman yang memabukkan, maka bagi orang yang tidak biasa minum minuman yang memabukkan tidak diqisosh sebab ia minum sesuatu dan ia mengira sesuatu itu tidak memabukkan kemudian hilang akalnya.<sup>51</sup>

<sup>48</sup>Ibid.,

<sup>49</sup>Munawwir, *Loc.Cit.*,

<sup>50</sup>Muhammad bin Qosim bin Muhammad bin Muhammad, Abu Abdullah Syamsuddin al-Ghozi, *Fathun al-Qorib al-Mujib Fi Syarh Alfaz al-Taqrir*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Alamiyah, tt), h.696.

<sup>51</sup>Muhlisin, (guru Fiqih pada Pon-Pes Al-Mubarak Bukitkemuning Lampung Utara, *Op.Cit.*,

وإن كان القاتل صبياً أو مجنوناً أو كافراً، وجبت عليه الكفارة.<sup>52</sup>

Artinya; Apabila orang yang membunuh itu anak kecil, orang gila atau orang kafir maka wajib bagi mereka kifarar.<sup>53</sup>

Karena menurut beliau hukuman penjara masuk dalam kategori *ta'zir* walaupun pada akhirnya hukuman ini disesuaikan kepada usia anak tersebut dan keputusan dari hakim. Karena jika dilihat dari haknya hukuman *ta'zir* sepenuhnya berada ditangan hakim, sebab hakimlah yang memegang tampuk pemerintahan kaum muslimin.<sup>54</sup>

Jika harus merujuk kepada hasil keputusan hakim mengenai pemberian hukuman penjara kepada anak, maka dapat langsung merujuk kepada undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dikemukakan oleh R.M. Sholeh Bajuri, kita hidup di negara hukum, semua tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat baik muslim atau non muslim harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Walaupun sebenarnya umat Islam memiliki hukum Islam yang mengikat secara langsung, tetapi yang berkaitan dengan perkara pidana hukum negara yang digunakan, semisal perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang anak, maka hukum yang digunakan pun hukum negara yaitu UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>55</sup>

Beliau juga mengatakan, pada kasus kejahatan anak atau yang lebih populer kita sebut dengan kenakalan anak. Maka, dengan bijak kita harus

---

<sup>52</sup>Imam Yahya bin Abilkhair bin Salim bin 'As'ad bin Abdullah bin Muhammad bin Musa bin Umar al-'Amuraniy, *al-Bayan (Fi Fiqhi Al-Imam Al-Syafi'i)*, Juz 11, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Alamiyah, tt), h. 549.

<sup>53</sup>Muhlisin, (guru Fiqih pada Pon-Pes Al-Mubarak Bukitkemuning Lampung Utara, *Loc.Cit.*,

<sup>54</sup>Munawwir, *Op.Cit.*,

<sup>55</sup>R.M. Sholeh Bajuri, *Loc.Cit.*,

melihat kepada keadaan psikologis anak tersebut. Jika, dalam hukum Islam ada bahasa *ahliyah* atau kecakapan, kecakapan ini adalah mengenai psikologis anak. Psikologis dari setiap anak akan berbeda satu dengan yang lainnya, ada anak yang sudah faham dengan tindakannya ada pula yang tidak dalam usia yang sama. Usia seorang anak, dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *tamyiz* atau *mumayyiz*, keadaan seorang anak pada fase ini dapat digolongkan kepada dua fase, fase pertama adalah *mumayyiz* dan fase *ghoiru mumayyiz*, fase *ghoiru mumayyiz* adalah mereka yang masuk dalam golongan *shobiyy* (kanak-kanak) maka mereka bebas sanksi, atau semua tindakan hukumnya diserahkan kepada walinya.<sup>56</sup>

Berbeda jika mereka masuk pada fase *mumayyiz*, yang umumnya mereka adalah anak yang berada pada rentang usia 7 tahun sampai *baligh* atau 15 tahun (menurut pendapat imam Syafi'i). Pada usia ini, anak tersebut masuk pada fase usia yang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tergolong kepada anak yang dapat dikenai tindakan atau pidana apabila terjadi pelanggaran. Dalam penjelasan umum UU tersebut (alenia empat) yang berbunyi; Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12

---

<sup>56</sup>*Ibid.*,

(dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.<sup>57</sup>

Seterusnya beliau mengatakan, memberi hukuman juga merupakan ajaran Rasulullah SAW., perintahkan, yang bunyinya;

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ. <sup>٥٨</sup>

Artinya : dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, ajarilah anak-anak kalian sholat ketika mereka mencapai usia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika telah mencapai usia sepuluh tahun.,<sup>59</sup>

Kata "pukullah" merupakan bentuk *ta'zir* yang perlu diterapkan dalam mendidik anak kepada sholat, dalam Islam sholat adalah kewajiban pokok dan utama. Dengan demikian seorang anak yang berada pada umur 10 tahun diperkenankan diberikan tindakan jika melalaikan kewajiban.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup>*Ibid.*,

<sup>58</sup>Al-Imam Al-Hafidz Al-Mushannif Al-Muttaqin Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'ab Al-Sajastani Al-Azadi,. *Op.cit.*, h. 133

<sup>59</sup>Ruqaiyyah Waris Maqsood dan Muhammad Iqbal, *Buku Pintar Sholat (Panduan Lengkap Sholat Seperti Yang Diajarkan Nabi Muhammad SAW)*, (Jakarta: Inovasi, tt), h. 60

<sup>60</sup>R.M. Sholeh Bajuri, M.H.I, *Op.Cit.*,